



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI**

JL. KOL M. KUKUH NO. 1 KOTABARU TELP. (0741) 41986 FAX. (0741) 41986
JAMBI – 36128

Email: pengadilantunjambi@gmail.com www.ptun-jambi.go.id

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan adanya Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 563/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/XI/2025 tanggal 19 November 2025 dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan *jo.* Keputusan Dirjen Badilmiltun pada tanggal 3 Maret 2014 Nomor: 28/DjMT/Kep/III/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dengan ini diumumkan kepada lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi, untuk mengikuti **seleksi lembaga penyedia bantuan hukum posbakum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun Anggaran 2026** sebagai berikut :

Nama Paket Pekerjaan	: Seleksi Lembaga Pemberi Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun Anggaran 2026
Lingkup Pekerjaan	: Pemberi Layanan Bantuan Hukum
Lokasi Pekerjaan	: Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nilai Total HPS	: Rp. 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
Waktu Pelayanan	: 288 jam/tahun

Persyaratan bagi lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi yang mendaftar sebagai pemberi layanan posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah sebagai berikut:

1. Berbentuk Badan Hukum (melampirkan akta notaris atau terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dan izin mendirikan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi dari Rektor bagi Perguruan Tinggi);
2. Berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
3. Memiliki Pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
4. Memiliki minimal 1 (satu) orang advokat;
5. Memiliki Akta Pendirian Lembaga;
6. Memiliki Kantor dengan alamat yang jelas;
7. Memiliki struktur kepengurusan yang jelas (melampirkan struktur/susunan organisasi);
8. Memiliki NPWP atas nama organisasi;
9. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum dan memahami proses beracara di PTUN;
10. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan;
11. Apabila menyertakan Mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada dibawah pengawasan seorang advokat atau sarjana hukum.

Pendaftaran dimulai dari tanggal 25 November 2025 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025 setiap hari kerja mulai pukul 08.00 – 15.00 Wib.

Permohonan beserta lampiran persyaratan ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melalui meja PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, pada hari dan jam yang telah ditentukan tersebut diatas.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Jambi, 24 November 2025
Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Posbakum
Ketua Panitia,


OKTOVA PRIMASARI